

**RESPON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM DI MYANMAR
TAHUN 2015-2020**

RYAN RIZKY RAMADHAN

ABSTRAK

Hak asasi manusia di Myanmar di bawah rezim pemerintahan militernya telah lama dianggap sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Beberapa organisasi hak asasi manusia internasional telah berulang kali mendokumentasikan dan mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Myanmar. Kerja paksa, perdagangan manusia dan pekerja anak adalah hal biasa. Rezim pemerintahan dan junta militer Burma juga terkenal karena merajalela penggunaan kekerasan seksual sebagai alat kontrol, termasuk tuduhan pemerkosaan sistematis dan pengambilan budak seks oleh militer. Pasukan keamanan di Myanmar melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang memerlukan penyelidikan dan penuntutan kriminal, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang dan penyebab dari kemunculan kasus pelanggaran HAM di Myanmar, serta respon dan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas kasus pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan melalui teknik analisis data. Peneliti menggunakan empat tahapan analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan/verifikasi data. Hasil akhir dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bacaan bagi umum dan khusus, yaitu para peneliti dan akademisi dalam bidang studi Hubungan Internasional, terutama pada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia (HAM), Myanmar

THE RESPONSE OF THE UNITED NATIONS IN RESOLVING CASES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR 2015-2020

RYAN RIZKY RAMADHAN

ABSTRACT

Human rights in Myanmar under its military rule regime have long been considered among the worst in the world. Several international human rights organizations have repeatedly documented and condemned widespread human rights violations in Myanmar. Forced labor, human trafficking and child labor are commonplace. The Burmese government regime and military junta are also notorious for the rampant use of sexual violence as a means of control, including allegations of systematic rape and the taking of sex slaves by the military. The security forces in Myanmar committed serious violations of international law that warrant criminal investigation and prosecution, namely crimes against humanity, war crimes and genocide. This research aims to discuss the background and causes of the emergence of cases of human rights violations in Myanmar, as well as the response and policies of the United Nations to cases of human rights violations in the region. The method used is descriptive qualitative using primary and secondary data sources. Data retrieval techniques are carried out through literature studies and through data analysis techniques. Researchers used four stages of data analysis, namely data collection, data reduction, data presentation and data withdrawal/verification. The final results of this study can be utilized as a reading reference for general and specific, namely researchers and academics in the field of International Relations studies, especially in cases of human rights violations.

Keywords: United Nations (UN), human rights, Myanmar